

BI DUKUNG KEMITRAAN VISA-ALTO

Pembayaran Digital Dorong Pertumbuhan Ekonomi

JAKARTA (KR) - Bank Indonesia mencatat, pengeluaran personal mengalami pertumbuhan 64,5 juta transaksi kartu debit senilai Rp 29 triliun pada bulan April 2021, meningkat hampir dua kali lipat dibandingkan April 2020.

Kondisi ini mencerminkan minat belanja rumah tangga yang kembali meningkat dan optimisme terhadap perekonomian Indonesia yang beranjak pulih secara bertahap di tengah pandemi Covid-19.

Pemerintah pun terus mendorong pengembangan ekosistem pembayaran digital, dalam sistem Gerbang Pembayaran Nasional. "Kami berharap kerja sama Visa dan ALTO akan mampu mendukung ekosistem pembayaran digital yang lebih aman, cepat dan murah untuk memperlancar transaksi keuangan, serta mampu menurunkan biaya transaksi

pembayaran, mendukung efektivitas kebijakan di sektor keuangan, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pembayaran digital dan sistem keuangan secara umum," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada peluncuran kemitraan Visa dan ALTO untuk memfasilitasi pemrosesan kartu debit secara domestik di Jakarta, Kamis (10/6).

Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia Fitriani Irmis Triswati mengatakan, BI mendukung penuh kemitraan ALTO dan Visa sebagai langkah penting meningkatkan kapabilitas pemrosesan transaksi kartu debit secara domestik dan memastikan standar operasional, manajemen risiko, dan keamanan yang berkualitas global.

"Kami meyakini kemitraan ini akan memberikan nilai tambah dalam men-

dukung Visi Sistem Pembayaran Bank Indonesia 2025, terutama terkait prinsip timbal balik dalam hal pemrosesan semua transaksi secara domestik di sistem GPN. Kami berharap kemitraan ini dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi digital yang sejalan dengan kepentingan nasional," paparnya.

Presiden Direktur Visa Indonesia Riko Abdurrahman menyatakan, pihaknya sangat antusias dalam menghadrkan teknologi pembayaran Visa yang canggih dan pengalaman lebih dari 60 tahun mengelola jaringan pembayaran global di dalam kemitraan dengan ALTO.

Menurut CEO ALTO Network Armand Widjaja, kemitraan ini menandakan pencapaian signifikan dari tujuan ALTO untuk menjadi mitra sistem pembayaran dan digital terkemuka dan terpercaya di Indonesia. (San)-f

PEMBENTUKAN KARAKTER SANGAT PENTING

Pendidik Harus Pandai Beradaptasi Saat Pandemi

YOGYA (KR) - Pandemi Covid-19 telah mendefinisikan ulang pendidikan. Para pelajar dan keluarganya dihadapkan pada model pengajaran dan pembelajaran yang berbeda dari model-model sebelumnya.

Wakil Ketua Pimpinan Wilayah NU DIY KH Fahmi Akbar Idries mengatakan, ada sesuatu yang hilang ketika pembelajaran dilakukan melalui virtual atau online, tanpa bertemu secara fisik dengan sesama siswa, teman, dan gurunya. Kondisi ini menjadikan pembentukan karakter, nilai dan sikap sangat sulit dipelajari jika hanya secara online.

"Jika pendidik tidak bisa beradaptasi dengan situasi yang disebabkan oleh pandemi, maka anak-anak berpotensi menjadi 'generasi yang hilang,'" kata Fahmi dalam webinar pendidikan bertema "The Future of Our Children K-12 Schools in the Age of Covid-19", Rabu (9/6). Webinar diselenggarakan oleh Nelnnet International, penyedia platform pendidikan dan pembayaran terkemuka.

Webinar menghadirkan sejumlah pembicara

ahli di dunia pendidikan seperti Rektor Universitas Amikom Yogyakarta Prof Dr M Sutanto MM, Duta Besar Indonesia untuk Australia Y Kristiarto Legowo dan President Indonesia Australia Business Council (IABC) Goerge Iwan Marantika.

Pembicara lain, Rebecca Hall (Commissioner for Victoria South East Asia, Victoria Govt), DeeAnn Wenger (President at Nelnnet Business Solutions), Joseph Egan selaku host (EVP, Global Solutions, Nelnnet International) dan Mark Wile (Executive Vice President FACTS International).

Goerge Iwan Marantika mengatakan, orangtua yang sebelumnya mendelegasikan banyak tanggung jawab untuk belajar kepada guru dan sekolah, sekarang diharapkan memainkan peran yang lebih banyak dalam pendidikan anak-anak mereka. "Di era pandemi Covid-19, peran orangtua dituntut lebih banyak dalam mendampingi belajar anak termasuk perkembangan sosial dan spiritual mereka," kata George Marantika. (Dev)-d

Kasus

yang diterima, kenaikan kasus itu disebabkan adanya penularan antar-tetangga maupun keluarga saat hajatan dan takziah. Padahal untuk mengantisipasi hal itu jauh-jauh hari Pemda DIY maupun Satgas Covid-19 telah mengingatkan masyarakat agar tak mengundang banyak tamu saat hajatan. Sementara untuk takziah bisa dihadiri keluarga terdekat. Hal ini dalam rangka menjaga kedisiplinan masyarakat dan mencegah terjadinya kerumunan.

Juru Bicara (Jubir) Pemda DIY untuk penanganan virus Corona Berty Murtiningsih menyampaikan lonjakan kasus terkonfirmasi Covid-19 harian di DIY. Meski melonjak, kasus sembuh di DIY bertambah sebanyak 233 kasus

maka total di angka 43.224 kasus. Sedangkan kasus meninggal mengalami penambahan 9 kasus, dengan demikian total kasus meninggal di DIY menjadi 1.248 kasus dari hasil verifikasi data Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten/ Kota. "Kenaikan kasus terkonfirmasi harian di DIY ini kembali melonjak di angka 455 kasus yang sebelumnya pernah terjadi pada akhir Januari 2021 lalu," ujar Berty.

Sementara kasus penularan Covid-19 di Kabupaten Gunungkidul meledak dan mencapai rekor tertinggi sejak Pandemi dengan jumlah warga terkonfirmasi positif hasil rapid test antigen maupun *Polymerase Chain Reaction* (PCR) mencapai 86 orang

dan muncul klaster-klaster baru di Pondok Pesantren (Ponpes) dan hajatan di Kapanewon Panggang, Karangmojo dan Playen Kamis (10/9). Terhadap munculnya klaster baru ini Dinas Kesehatan terus melakukan tracing terhadap warga termasuk di salah satu ponpes di Playen yang dari catatan sementara terdapat sebanyak 14 santri terkonfirmasi positif. "Munculnya penularan di sejumlah tempat sedang kami telusuri dan tracing terhadap mereka yang memiliki riwayat kontak dengan terkonfirmasi positif terus dilakukan," kata Kepala Dinas Kesehatan Gunungkidul dr Dewi Irawaty M Kes Kamis (10/9). (Ira/Ria/Bmp/Ded)-f

Sambungan hal 1

OJK

besar atau kaya hanya dalam satu hari? Itu tidak mungkin. Investasi ilegal ini modusnya sangat banyak jadi bisa kita bantasi dengan kunci 2L itu," tandasnya.

SWI juga menyoroti kasus seorang guru di Semarang yang terliilit utang pinjol hingga ratusan juta dan kasus-kasus pinjol lainnya yang sedang marak. OJK telah memblokir setidaknya 3.193 pinjol ilegal. Data yang ada di 138 pinjol legal telah memiliki 55 juta rekening nasabah dengan outstanding Rp 18 triliun.

"Jadi sebenarnya pinjol ini sangat membantu nasabahnya, karena tujuannya menjembatani kebutuhan dana masyarakat yang tidak bisa dilayani sektor jasa keuangan. Tapi masalahnya, banyak yang masuk ke pinjol ilegal karena sangat mudah meminjam tapi akibatnya sangat berbahaya dengan fee dan bunga sangat tinggi. Yang paling berbahaya lagi, jika minta akses data dan kontak handphone nasabah. Data itu akan digunakan untuk penagihan apabila tidak bayar lalu diteror dan sebagainya se-

hingga sangat berbahaya sekali," ungkap Tongam.

SWI tidak menampik meskipun sudah memblokir ribuan pinjol, namun tetap menjamur pinjol-pinjol lainnya, ibaratnya mati satu tumbuh seribu karena banyak servernya di luar negeri. Karena itu, OJK terus melakukan pemblokiran pinjol ilegal tersebut dan merespons dari sisi edukasi masyarakat agar meminjam secara cerdas. Tipsnya jika ingin meminjam pinjol yaitu pinjamlah di pinjol yang terdaftar di OJK, pinjam sesuai kebutuhan dan kemampuan bayar, pinjam untuk keperluan produktif serta pahami risikonya terlebih dulu.

"Bagi masyarakat yang sudah telanjur meminjam di pinjol ilegal segera tinggalkan dengan melunasi pinjaman. Jika sudah diteror dan diintimidasi segera diblokir dan segera informasikan semua kontak Anda lalu laporkan ke polisi," tegas Tongam.

Kasubdit II/Ekonomi Khusus Polda DIY Hario Duta Pamungkas menambahkan, penanganan pinjol adalah ko-

laborasi pihak perbankan dengan Tim Cyber Kepolisian. Beberapa aduan masyarakat yang diterima Polda DIY, terkait tersebarnya identitas peminjam kepada pihak ketiga hingga ancaman penyebaran data diri.

"Kami sementara masih menangani tiga perkara yang dalam proses penyelidikan, selebihnya masyarakat mengadu lebih cenderung kepada konsultasi mumi masalah utang-piutang pinjol. Seperti tidak bisa membayar pinjol lalu gali lubang tutup lubang dengan mendaftarkan di aplikasi lain. Jika ada tindakan yang masuk dalam pidana seperti intimidasi, ancaman dan sebagainya sudah pasti akan ditindaklanjuti," jelasnya.

Hario mengatakan, kendalanya para pelaku menyembunyikan data-data untuk mengambil data orang lain sehingga sulit ditelusuri. Polda DIY butuh waktu menelusuri apabila ada aduan pinjol terkait identitas para pelaku yang kebanyakan merupakan pihak ketiga dan ada faktor ketidaksengajaan peminjam mengizinkan pinjol untuk mengakses data dari seluruh ponselnya. (Ira)-d

Sambungan hal 1

Gagal

"Tergugat punya kewenangan penuh jalannya arisan termasuk pemilihan member yang diizinkan mengisi room dengan nilai arisan dari Rp 1 juta hingga Rp 50 juta, pembayaran melalui transfer rekening Tergugat GP, dibantu tenaga admin," jelasnya.

Pada awalnya arisan berjalan lancar, hingga September mulai tersendat dan 25 Januari 2021 macet dengan total kerugian material para Peggugat mencapai Rp 1.018.492.000. "Dari arisan Tergugat I sudah meraup keuntungan Rp 600 juta lebih. Sebelumnya Tergugat II juga berjanji akan membantu menyelesaikan kewajiban Tergugat I, bahkan Tergugat I juga berjanji menjual tanah untuk membayar arisan, tetapi tidak direalisasikan hingga kami mengajukan gugatan ini," jelasnya.

'Emak-emak' para Peggugat yang terdiri dari berbagai latar belakang sosial, pengusaha,

ibu rumah tangga, hingga penjual sayuran ini juga mengajukan sita jaminan atas mobil milik Tergugat GP. "Walau nilainya belum mengcover nilai tuntutan tetapi setidaknya dengan tidak dapat menggunakan kendaraan, Tergugat GP bisa mengerti pahitnya perjuangan kami menuntut hak," tegasnya.

Sebelumnya dalam persidangan dengan Ketua Majelis Hakim Agus Supriyono SH menyatakan gugatan perdata sebelum masuk pokok perkara supaya dilakukan upaya mediasi oleh kedua belah pihak. Sidang tanpa kehadiran Tergugat yang diwakili Kuasa Hukum Arwa Robika SH. "Kami siap mengikuti proses sampai selesai dan akan memberikan perlawanan bila klien kami tidak bersalah. Tergugat tidak bisa hadir karena kesehatan dan ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan," ucap Arwa ketika dikonfirmasi usai persidangan. (Vin)-d

Sambungan hal 1

Menko

secara terpadu di hulu maupun hilir, dengan melibatkan semua stakeholders. Jadi, dalam pengelolaan sebuah infrastruktur waduk/bendungan tidak bisa dimaknai hanya sebatas kegiatan operasi dan pemeliharaan badan waduk saja, tetapi juga mencakup pengendalian erosi dan sedimentasi yang berasal dari sempadan waduk (*green belt*) dan daerah tangkapan air atau Daerah Aliran Sungai (DAS).

"Untuk itu, Kementerian PUPR, Kementerian LHK, Kementan, dan Pemerintah Daerah agar bersama-sama memusatkan atensinya dalam pengendalian erosi dan sedimentasi untuk menjaga kondisi hulu DAS dan kelangsungan fungsionalitas bendungan yang sudah ada, terutama 61 bendungan baru yang akan dibangun untuk mendukung ketersediaan air, ketahanan pangan (*food estate*), penyediaan listrik melalui *renewable energy*, dan pengendalian banjir di daerah hilir," paparnya.

Dalam hal Rekomendasi Perspektif Sumber Daya Air untuk Pengembangan Calon Ibukota Negara, supaya optimal, maka dalam pengelolaan sistem penyediaan air minum, pengelolaan air limbah/sanitasi, dan konservasi sumber air, perlu terintegrasi dengan menerapkan sistem *smart*

technology.

Sementara, untuk Rekomendasi Metodologi Indeks Ketahanan Air Nasional, dapat diimplementasikan konsepsi Metodologi Indeks Ketahanan Air dalam mengukur indikator pencapaian pengelolaan SDA yang diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu instrumen dalam proses perumusan kebijakan Pemerintah ke depannya. "Kami selaku Ketua Dewan SDA Nasional juga mengimbau dan mendorong Pemerintah Provinsi dapat mengaktifkan kembali daruata membentuk Dewan SDA Provinsi, sebagai wadah koordinasi pengelolaan SDA yang nantinya diharapkan dapat segera menyusun beberapa hal, di antaranya: Kebijakan Pengelolaan SDA Provinsi berserta matriks tindak lanjut pelaksanaannya; dan Indeks Ketahanan Air Provinsi, agar program dan kegiatan pengelolaan SDA di tingkat provinsi dapat dievaluasi secara terukur," ucap Airlangga.

Airlangga menyetujui Rencana Kerja Dewan SDA Nasional Tahun 2021 yang harus dilaksanakan sebaik-baiknya oleh seluruh Anggota Dewan SDA Nasional. Diharapkan pula Sidang Pleno Dewan SDA Nasional ini dapat dilaksanakan minimal satu kali dalam tiga bulan. (Fie)-d

Sambungan hal 1

'Menjual'

Informasi Dewan Penasihat Asosiasi Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia, ada beberapa periode pembelian panik di Indonesia, yaitu 2 Maret 2020, saat pertama kali diumumkan terdapat dua kasus positif korona di Indonesia. Periode kedua saat ada permintaan untuk bekerja di rumah dan belajar di rumah selama 14 hari. Periode ketiga, ada 308 kasus korona positif di Indonesia, dan 25 orang meninggal. Beberapa kejadian perilaku konsumtif di atas dipicu oleh kejadian luar-biasa yang sifatnya alamiah.

Fenomena yang mengarah pada perilaku konsumtif secara masif di atas disebabkan respons psikologis masyarakat sebagai pemenuhan kebutuhan rasa aman. Unsur rasional yang terlibat terkait dengan ketidakpastian informasi yang menyebabkan timbulnya risiko. Perilaku penghindaran risiko akibat ketidakpastian diwujudkan dengan perilaku beli yang bersifat jaga-jaga. Ada sensasi rasa aman atau semua seolah sudah terkontrol dengan baik yang didapat oleh pelaku *panic buying*. Kondisi luar biasa tersebut menimbulkan *herd behavior* atau bertingkah laku sama secara massal atau yang disebut dengan ikut-ikutan.

Beberapa hari lalu, (9/6), masyarakat dikejutkan perilaku pembelian yang menyebabkan antrean luar biasa melalui pesanan online. Sehingga sampai berdampak pada penutupan beberapa gerai dari salah satu restoran cepat saji selama masa pandemi. Kejadian fenomenal ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di beberapa negara lainnya. Meskipun tidak semasih *panic buying*, kejadian fenomenal ini cukup menarik untuk diamati.

Agak berbeda dengan *panic buying* dikarenakan kondisi pemicu yang terjadi bukan bersifat alamiah namun bagian dari strategi pemasaran yang telah didesain melalui perencanaan promosi. BTS meal edisi terbatas sebagai kolaborasi produk McDonald's dengan boyband Korea BTS cukup fenomenal dilihat dari respons masyarakat. Luncuran produk BTS Meal mendapat respons luar biasa khususnya didominasi kalangan milenial, merupakan sebuah bentuk fanatisme yang luar biasa dari penggemar boyband BTS yang disebut ARMY.

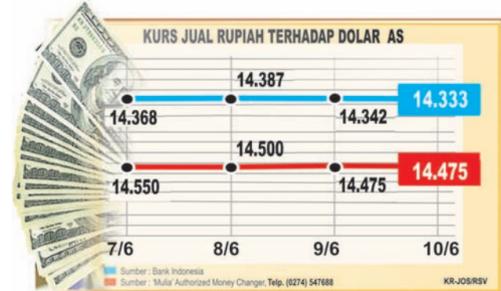
McDonald's secara khusus mendesain kotak dan gelas minuman BTS Meal dengan warna ungu yang

Sambungan hal 1

identik dengan BTS. Pembungkus menu menjadi incaran utama meskipun hanya berupa kotak yang terbuat dari karton biasa. Secara rasional, tentu pembungkus merupakan pelengkap dari produk inti, yaitu Mc Chicken Nugget, French Fries, Coca-cola, Saus Cajun dan Sweet Chili. Adanya pergeseran produk inti menjadi produk pelengkap dan sebaliknya, disebabkan perubahan orientasi pemicu rasional ke emosional. Fanatisme pada selebritas menjadi produk inti disertai pemicu tambahan lainnya yaitu kelangkaan dalam wujud edisi terbatas.

Media sosial turut juga menjadi salah satu perantara efektif yang menjadikan fenomena ini semakin meluas. Di masa pandemi ini, masyarakat cenderung mengalihkan aktivitas ke media sosial. Sehingga tak dapat dipungkiri, kondisi tersebut cepat menjadi kejadian luar biasa. Alangkah baiknya kondisi fenomenal ini dapat menjadi contoh pembelajaran yang baik dan diadopsi dalam mengembangkan promosi di berbagai sektor pemerintah daerah maupun pusat.

(Penulis adalah Dosen Fakultas Ekonomi UNY, Lektor Kepala Bidang Riset Pemasaran)-d



Prakiraan Cuaca						Jumat, 11 Juni 2021	
Lokasi	Pagi	Siang	Malam	Dini Hari	Suhu C	Kelembaban	
Bantul					24-31	60-95	
Steman					23-31	65-95	
Wates					24-31	60-95	
Wonosari					23-31	65-95	
Yogyakarta					23-31	65-95	



Muhammad Zuhdan, S.I.P.M.A
Kepala Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Amikom Yogyakarta

Makna Politik RPJMD

RENCANA Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) secara politis merupakan ruang dokumentasi perjumpaan visi misi program kepala daerah dengan aspirasi rakyat yang memilihnya saat pemilihan kepala daerah (Pilkada). Narasi dalam setiap kalimat, paragraph, atau bab dalam dokumen RPJMD adalah ekstraksi visi misi dan

RPJMD : Kontrak Politik Kesejahteraan Rakyat

program kepala daerah bercampur aspirasi rakyatnya. RPJMD seperti sebuah manifesto atau rumusan cita-cita bersama lima tahun ke depan antara kepala daerah dengan rakyatnya. Sebagai sebuah rumusan cita-cita politik bersama, RPJMD memiliki makna politis yang kuat bagi seorang kepala daerah maupun rakyatnya. Oleh sebab itu, RPJMD lebih dari sekedar dokumen perencanaan yang bermakna teknokratis administratif saja, tetapi lebih sebagai ruh politis pemimpin daerah dalam membangun daerahnya.

Makna politis itu menguji akuntabilitas janji politik kepala daerah kepada rakyatnya saat Pilkada. Bagi rakyat, RPJMD adalah sebuah kontrak politik yang akan selalu ditunggu hasil dan dampaknya di setiap akhir tahun anggaran. Artinya, RPJMD adalah dokumen mandat politik dari rakyat kepada kepala daerah untuk direalisasikan agar tertunaikan janji-janji politik saat kampanye politik Pilkada sebelumnya. Tentu bagi

seorang kepala daerah, RPJMD sebuah ujian politik yang berat jika setiap perencanaan yang ada tidak bisa diterjemahkan dan dilaksanakan sepenuhnya oleh beragam Organisasi Pemerintahan Daerah (OPD) dibawahnya agar sampai dampaknya kepada rakyat ditambah tekanan oposisi politik dan kelompok kepentingan yang belum terkonsolidasikan pasca Pilkada.

RPJMD memiliki kedudukan dan fungsi strategis dalam pembangunan suatu daerah. Hal ini dikarenakan RPJMD merupakan acuan dan panduan utama manajemen pembangunan daerah untuk setiap tahunnya, selama lima tahun. RPJMD juga memberikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan untuk mewujudkan visi pembangunan daerah.

Dengan demikian pemerintah daerah dengan mudah dapat mengevaluasi capaian pembangunan yang dilaksanakan, sesuai dengan Permendagri



Nomor 54 Tahun 2010 setidaknya telah menyediakan pedoman melakukan perencanaan dan evaluasi kinerja pembangunan daerah.

Pembangunan daerah yang inklusif, akomodatif dan responsif harus terefleksikan dalam proses penyusunan RPJMD yang menjadi acuan perencanaan dan penganggaran untuk menjamin program dan kegiatan yang dibuat oleh seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) baik dinas maupun badan. Keberhasilan capaian kinerja pembangunan sangat bergantung pada hilirisasi isu-isu strategis kedalam program-program prioritas seperti penyediaan infrastruktur sosial yang penting dalam upaya memberdayakan masyarakat sehingga pada gilirannya akan

menurunkan kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup. Namun disisi lain, rendahnya pasokan data dan kurangnya pemahaman dalam penyusunan RPJMD berbasis data dan fakta (eviden based planning) serta paradigma penyusunan RPJMD yang tidak menganut Problem Base Approach (PROBA) tentunya ini tidak berbanding lurus dengan besarnya biaya yang dikeluarkan dalam penyusunan RPJMD. Kekuatan Problem Base Approach (PROBA) terletak pada kemampuan memetakan permasalahan publik, mengidentifikasi isu-isu kritis (critical issue) dan merancang seperangkat langkah aksi yang fokus dan terkoordinasi, serta ditunjukkan langsung pada inti permasalahan publik dan daerah.

Keberadaan RPJMD menjadi jembatan untuk menjaga sinergisitas perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan di daerah dalam kurun waktu 5 tahun. Hal ini penting

agar tidak terjadi perombakan orientasi pembangunan secara frontal setiap tahun, mengaitkan berbagai kepentingan partai politik pendukung kepala daerah yang menyertainya maka perencanaan pembangunan daerah akan sangat rentan terjadi perombakan ataupun melenceng dari apa yang sudah dituliskan.

RPJMD: Instrumentasi Daerah dalam Mengejar Ketertinggalan Seringkali fakta dilapangan menunjukkan bahwa proses pembangunan yang dilaksanakan justru menjadi akar dari ketertinggalan itu sendiri karena pembangunan yang dilaksanakan cenderung bias kelas dan bias kepentingan politis, tidak akomodatif terhadap kebutuhan masyarakat dan responsif akan permasalahan yang muncul ditengah masyarakat. RPJMD diharapkan menjadi instrumen peningkatan taraf hidup masyarakat lokal dengan menciptakan struktur perekonomian daerah yang bisa dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. (*)